

STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

Risha Agustin Batubara ¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang strategi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam hal melaksanakan kegiatan pra kampanye pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, strategi pada saat pelaksanaan kampanye, dan mencari faktor pendukung dan penghambat yang terjadi saat kampanye pemilihan umum berlangsung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik analisis interaktif dimana yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Abdul Rohim, S.P, selaku Ketua Bidang Humas DPW PKS Kalimantan Timur; H. Dedi Kurniadi, selaku Ketua Umum DPW PKS Kalimantan Timur; dan Hariyanto, selaku Bagian Pendataan DPW PKS Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemenangan pemilihan umum Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 adalah menjalin hubungan erat dengan koalisi partai; melakukan konsolidasi tim dari seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan membangun tim pemenangan formal hingga tim relawan; memberikan materi terkait permasalahan kampanye kepada masyarakat; penyebaran informasi melalui media offline seperti penyampaian melalui silaturahmi kepada masyarakat, hingga penyampaian melalui media online seperti media massa, media sosial, dan media cetak. Adapun faktor pendukung dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah profil pasangan calon yang dinilai baik oleh masyarakat, soliditas tim dan dukungan yang kuat dari setiap tim pemenangan formal dan relawan; tercukupinya pendanaan untuk kegiatan selama masa kampanye. Kemudian, faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan kampanye oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah terjadinya miskomunikasi antar tim pemenangan yang menyebabkan salah persepsi, dan black campaign yang dilakukan oleh pihak pesaing.

Kata Kunci: *Partai Keadilan Sejahtera, Strategi Partai, Pemilihan Umum, Partai Politik*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Pendahuluan

Perbedaan visi misi yang terjadi antara tiap-tiap partai menimbulkan strategi pemenangan yang cenderung berbeda. Pemasangan banner, penyebaran pamflet, penempelan stiker, acara rutin bulanan atau tahunan yang bertemakan kesehatan, bantuan-bantuan amal yang mengatasnamakan partai politik tertentu, hingga memberikan souvenir atau cinderamata kepada masyarakat itulah yang menjadi beberapa strategi umum yang dilakukan partai politik untuk menarik minat masyarakat. Dengan memperkenalkan nama Partai Politik dalam berbagai bentuk kegiatan, masyarakat diharapkan memberikan suara mereka dalam setiap Pemilu kepada bakal calon yang diusung Parpol tersebut untuk memimpin sebuah daerah.

“Partai Politik sendiri merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yang mempunyai nilai orientasi dan cita-cita yang sama, yaitu untuk memperoleh sebuah kekuasaan politik yang menggunakan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan partai. Partai politik merupakan wadah dan sarana bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan sebuah negara.” (Miriam Budiardjo, 2008:404) Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pasal 1 ayat (1) partai politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Keterlibatan Partai Politik dalam kontestasi politik biasanya terjadi dalam agenda Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan sarana yang digunakan ataupun diselenggarakan untuk memperoleh hasil yang menentukan siapa yang akan memegang jabatan pada suatu daerah dan memegang peran sebagai wakil rakyat untuk periode kedepannya. Pemilu juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dari puluhan Partai Politik yang ada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang selalu turut serta dalam setiap Pemilu, Mulai dari Pemilu untuk pemilihan Presiden hingga Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, hingga Kabupaten/kota. PKS yang sudah berdiri sejak 1998 pun sempat mengalami pasang surut perolehan suara. PKS merupakan partai yang berawal dari

gerakan aktivitas dakwah Islam ini mampu bertahan dan bersaing pada persaingan di berbagai pemilihan umum yang telah diselenggarakan, seperti pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang pada hal ini pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Timur pada periode tahun 2018-2023.

Kala itu PKS bersama dengan dua partai besar, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Partai Gerindra mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu DR. Ir. H. Isran Noor, M.Si sebagai calon Gubernur dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si, sebagai calon Wakil Gubernur periode masa jabatan 2018 hingga 2023. Pemilihan Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 lalu diikuti oleh empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang juga diusung oleh partai-partai besar lainnya. “Pada Pilgub tahun 2018 ini pun, pasangan calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional memenangkan Pilgub periode tahun 2018-2023 dengan memperoleh jumlah suara yaitu 417.711 suara dengan total persentase sebesar 31,33% dari 1.333.090 suara yang sah dengan total persentase sebesar 96,38%. Untuk daerah Samarinda sendiri, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga ini memperoleh 113.372 suara, dengan jumlah persentase sebesar 8,50%.” (sumber: KPU Kaltim)

Dalam mewujudkan kemenangan bagi pasangan calon yang diusungnya, PKS bersama dua partai politik lain yang menyokong Isran-Hadi ikut berpartisipasi dan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diiringi dengan mempromosikan pasangan calon yang akan bertanding di Pilgub Kalimantan Timur tahun periode 2018-2023 tersebut, terutama di Kota Samarinda. Berbagai kegiatan dilaksanakan pun menjadi strategi dalam mencari minat dan suara masyarakat, dan juga sebuah perwujudan yang dilakukan untuk menarik simpati masyarakat agar mau memberikan suaranya kepada pasangan calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen Strategi

Manajemen strategi sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah tindakan untuk menyusun sebuah rencana, menganalisis sasaran strategi, hingga pengambilan keputusan penting dalam sebuah organisasi. “Manajemen strategi merupakan serangkaian kegiatan yang mengarah pada keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang menyangkut tentang persoalan penyusunan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan menggunakan analisa *SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat)*”. (Wheelen dalam Eddy Yunus 2016:7)

Sementara manajemen strategi juga dianggap sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi perencanaan yang dirancang untuk meraih tujuan organisasi ataupun perusahaan. Disampaikannya juga ada sembilan tugas penting dari manajemen strategi, yaitu: (Eddy Yunus

2016:5), “(a) Merumuskan misi perusahaan mengenai maksud, filosofi, dan sasaran dari perusahaan. (b) Melakukan analisis yang mencerminkan kondisi dan kemampuan internal perusahaan. (c) Menilai lingkungan luar perusahaan, dari segi faktor persaingan maupun faktor kontekstual lain. (d) Menganalisis setiap pilihan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu dengan cara menyesuaikan sumber daya dan lingkungan luar perusahaan. (e) Mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan yang paling menguntungkan yang sesuai dengan misi dari perusahaan.”

Manfaat dari manajemen strategi sendiri yaitu membantu organisasi untuk memformulasikan strategi agar menjadi lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, logis, dan rasional. Semakin banyak organisasi yang menggunakan manajemen strategi, maka semakin menjamin keberhasilan dari pencapaian masa depan organisasi tersebut. Jika tidak, maka kemungkinan akan mengakibatkan kekacauan dan disfungsi organisasi.

Strategi

Strategi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk individu, kelompok, atau bahkan sebuah organisasi agar dapat mencapai suatu sasaran dan tujuan yang diharapkan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. “Tahapan yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh pelaku kegiatan yaitu dimulai dari cara menyusun strategi gerakan, cara mempertahankan gerakan, cara mengatasi masalah yang akan dimunculkan, hingga cara menjalankan strategi yang dibuat.” (Mahardika, 2006:58)

Politik

Politik adalah kegiatan yang bermacam-macam pada suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses penentuan dari tujuan sebuah sistem dan melaksanakan tujuan tersebut. Politik merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. “Politik bukan hanya menyangkut tujuan pribadi, melainkan juga menyangkut tujuan seluruh masyarakat. Politik juga menyangkut kegiatan dari berbagai kelompok termasuk kegiatan individu dan partai politik” (Budiardjo, 2008:8). Politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik.

Strategi Politik

Strategi politik merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk merealisasikan harapan dan keinginan dalam kegiatan politik, seperti misalnya adanya pembentukan suatu struktur dalam organisasi atau lembaga pemerintahan. Bila tidak ada strategi politik, maka perubahan politik dalam jangka panjang tidak akan dapat terlaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam dunia politik, strategi yang digunakan berupa *branding* politik, kebijakan, isu politik,

dan *marketing* politik. *Branding*, kebijakan, isu politik, dan *marketing* politik dilakukan untuk meraih posisi tertentu di mata pesaing agar dapat mencapai tujuan yang sudah dirancang sesuai dengan strategi yang dibuat, yaitu meraih kemenangan. “Strategi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terkait tidak menutup kemungkinan bisa ditiru dan dicontoh oleh pihak lain, namun seperti *branding*, kebijakan, isu politik serta *marketing* tidak meniru keseluruhan, hanya berisi garis besar dan intinya saja. Karena *branding* yang ditawarkan oleh pesaing akan bergantung pada ciri khas tersendiri, dan inilah yang dapat membedakannya dari pelaku politik lain.” (Firmanzah. 2008:141)

Partai Politik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa “fungsi dari partai politik adalah sebagai Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; partisipasi politik warga negara Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.” Secara keseluruhan fungsi di atas dapat diwujudkan melalui konstitusional.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. “Komunikasi politik diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik” (Astrid S. Soesanto, 2006:3).

Komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik yang dikemukakan oleh Asep Saeful (2008:31-34) antara lain: “komunikator, yang menjadi pihak yang memelopori dan memberikan arahan pada komunikasi; khalayak komunikasi politik, yaitu pihak penerima pesan yang dapat memberikan respon atau *feedback* atau umpan balik dari bentuk pemikiran, sikap, ataupun perilaku politik yang diperankannya; dan saluran komunikasi politik, sebagai pihak atau unsur yang menyampaikan pesan-pesan politik.” Komunikasi politik merupakan hal terpenting dalam menjamin terlaksananya fungsi-fungsi dari pemerintahan daerah demi kepentingan masyarakat agar mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah “kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang turut aktif dalam kegiatan politik, dengan memilih dan memberikan suara terhadap calon pemimpin, mengikuti pertemuan umum yang mengarah ke politik, mempunyai hubungan dan pertemuan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, hingga menjadi salah satu anggota parlemen atau pejabat pemerintahan.” (Huntington dan Nelson, 1997:9)

Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan pada pasal 1 ayat 1 pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan memberikan suara mereka terhadap calon legislatif, calon pemimpin daerah, hingga Presiden dan Wakil Presiden ketika sudah menginjak usia 17 tahun atau sudah menikah.

Kampanye Pemilu

dalam pasal 267 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye anggota DPR, DPD, dan DPRD.”

Kampanye pemilu dilaksanakan sejak tiga hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Kampanye dilaksanakan selama 21 hari hingga masa tenang ditetapkan. Dan Nimmo (2009:48) menyebutkan “beberapa jenis kampanye yaitu: kampanye berorientasi pada produk; kampanye berorientasi pada kandidat; kampanye berorientasi pada sebab khusus berdimensi sosial; dan kampanye berorientasi pada penyerangan seperti hal negatif dan *black campaign*.”

Pilkada

Pilkada merupakan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang mencalonkan diri. Kepala daerah yang dimaksud dapat mencakup Gubernur beserta Wakil Gubernur untuk wilayah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk wilayah Kabupaten, dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota untuk wilayah Kota. Menurut Prihatmoko (2005:115), “sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah, dimana karakter dan watak persaingan yang dimaksud adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol

dari kompetisi dalam pilkada yang juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.”

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa kalimat tertulis, dan bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka dan bilangan. Metode analisis yang digunakan berjenis kualitatif dan menjadikan Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kalimantan Timur Partai Keadilan Sejahtera yang beralamat di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai lokasi penelitian.

Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari narasumber dan diperoleh melalui hasil wawancara. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode Studi Kepustakaan (Library Research).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dalam Pengembangan Produk Unggulan UMKM Jembatan Ulin di Kabupaten Paser

Dalam rangka mendukung strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada masa kampanye pemilu yang diselenggarakan menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur Kalimantan Timur, pasangan calon Dr. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, M.Si., menempatkan strategi yang membuatnya menang sebagai Gubernur Kaltim, antara lain kampanye politik dan kekuatan partai. Untuk strategi yang dilakukan oleh PKS menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur, Ketua Bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera DPW Kalimantan Timur mengatakan bahwa :

“Supaya pasangan yang diusung ini dikenal seluruh masyarakat Kalimantan Timur, dan selanjutnya memperoleh suara massa yang banyak, PKS Kalimantan Timur melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan oleh seluruh pengurus PKS, mulai dari pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC) sampai Dewan Pengurus Ranting (DPRa), sampai ke pengurus yang ada di RT di setiap desa.” (*Hasil wawancara, 2021*).

Dilanjutkan kembali oleh Ketua Bidang Humas yang mengatakan bahwa:

“Pada masa kampanye kami dari partai banyak menggunakan kekuatan media massa. Cara ini digunakan untuk membuat perhatian khusus bagi publik. Kampanye melalui media massa tidak hanya dilakukan di media elektronik, namun dilakukan pula melalui media cetak. Dalam media elektronik, seperti televisi biasanya dilakukan melalui media iklan. Dalam tayangannya kandidat selalu melakukan pendekatan dengan masyarakatnya sambil menyampaikan visi, misi dan tujuan mereka maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur.” (*Hasil wawancara, 2021*).

Strategi kampanye yang dilakukan oleh partai Keadilan sejahterah (PKS) dalam memenangkan pasangan calon Dr. H. Isran Noor dan H. Hadi Mulyadi, M.Si adalah suatu capaian yang luar biasa dan sesuai yang diinginkan. Melalui kampanye tentu partai PKS memasang program-program unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu dengan cara seperti itu untuk menarik masyarakat untuk memilihnya. Selain itu PKS juga membentuk tim-tim pemenangan sebagai perpanjangan tangan kerja partai untuk mengajak masyarakat sampai ke pelosok untuk memilih calon Gubernur yang diusungnya. Dalam pemasaran strategi ini terdapat tahapan-tahapan yang disusun terlebih dahulu melalui tim sukses yang sudah dibentuk oleh partai itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan yang diinginkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi yang dipersiapkan PKS dieksekusi dalam proses kampanye yang dilakukan oleh pasangan kandidat calon dilakukan melalui media televisi dan media sosial saat ini merupakan media yang cukup efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain itu kampanye juga dilakukan melalui pendekatan persuasive dengan cara langsung terjun ke kalangan masyarakat dan melakukan sosialisasi serta membagikan selebaran tentang kandidat calon yang diusung yang memuat program kerja dan visi misi masing-masing kandidat. Faktor utama yang mewarnai pelaksanaan pemilihan umum yang mempengaruhi kemenangan pasangan Dr. H. Isran Noor dan H. Hadi Mulyadi adalah menguatnya politik identitas. Terkait dengan faktor pendukung strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemenangan pemilihan umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, penulis melakukan wawancara dengan Ketua Umum DPW PKS Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa:

“kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dianggap dapat menampung dan mewujudkan impian serta harapan-harapan masyarakat. Melalui program yang diajukan kandidat tersebut dianggap dapat memenuhi harapan masyarakat dan pembangunan Kaltim ke depan. Selain hal tersebut, faktor pendukung PKS yang didapat PKS dari para tokoh-tokoh lokal yang ada di Kalimantan Timur juga mendukung untuk mendulang suara”. (*Hasil wawancara, 2021*).

Selain itu, nama baik dan citra sosial calon pasangan yang diusung juga menjadi keunggulan tersendiri, sehingga masyarakat mampu dengan cepat mengenali dan mengetahui *track record* dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Dr. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si. Dengan mengetahui jelas jejak *history* pasangan yang diusung ini, maka masyarakat dapat membandingkan dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Humas DPW PKS Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa:

“kedua kandidat yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera memiliki kharismanya, kemampuan intelektualnya, maupun kemampuan

beradaptasi dengan komunitas di mana ia berada. Hal tersebut terbukti pada saat Dr. H. Isran Noor, M.Si menjabat Bupati Kutai Timur sangat dekat dengan masyarakat sehingga bisa terpilih selama 2 periode. Begitu juga dengan Bapak H. Mulyadi, S.Si., M.Si juga dekat dengan masyarakat sehingga dia bias terpilih menjadi anggota DPR RI. Faktor yang ikut menentukan strategi pemenangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kehidupan pribadi dan peristiwa yang dialami selama karier yang dijalani sebelum terpilih sebagai seorang kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Kedua kandidat tersebut dianggap sangat dekat dengan masyarakat". (*Hasil wawancara, 2021*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa perancangan strategi kampanye pemenangan berbasis kekuatan yang dilakukan oleh pasangan kandidat yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan pendekatan yang bersifat persuasif dan dengan program kerja unggulan yang memang dirancang betul-betul guna kemajuan suatu daerah yang nanti akan dipimpinnya. Di samping itu juga jaringan finansial karena menurut informan hal ini merupakan hal yang utama dalam sebuah pertarungan politik, disusul pemanfaatan kekuatan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik hingga media sosial semuanya difungsikan guna untuk menarik perhatian masyarakat, tak luput juga komunikasi secara langsung baik verbal maupun non-verbal dengan masyarakat dengan tujuan membentuk pencitraan dari pasangan kandidat dimata masyarakat.

Pihak partai politik pengusung juga melakukan perancangan strategi kampanye pemenangan berbasis peluang oleh pasangan kandidat berdasarkan dari hasil wawancara yang didapat terlihat bahwa kandidat memang benar benar memanfaatkan peluang-peluang yang ada, seperti pernyataan dari Ketua Bidang Humas DPW Kalimantan Timur yang mengatakan memanfaatkan komunikasi publik dengan menggunakan saluran media sosial seperti *facebook*, *Instagram* dan *twitter* untuk memperbesar peluang keberhasilan kampanye dari pasangan kandidat karena sosial media memang sudah menjadi pusat perhatian banyak orang. Peluang lain yang juga dimanfaatkan oleh pasangan kandidat yaitu dengan menggunakan jasa riset politik salah satu lembaga survei yang berfungsi untuk memetakan kelebihan dan kelemahan pasangan kandidat dan pesaingnya sebelum bertarung di arena pemilihan.

Partai Keadilan Sejahtera secara rutin terlibat dalam program pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan. Dengan sistem kaderisasi yang teratur, PKS membangun militansi kadernya. PKS secara konsisten memberikan dukungan bagi perjuangan umat Islam di seluruh dunia lewat lobi di parlemen, demonstrasi, maupun penggalangan dana. Dalam setiap demonstrasi maupun kampanye mereka, PKS dianggap "mendatangkan contoh" mengerahkan massa dalam jumlah banyak dengan tertib dan aman. Selanjutnya PKS menjelang masa kampanye menerapkan strategi utamanya yakni sosialisasi secara tatap muka kepada masyarakat, penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan,

hingga mengunggah iklan dan media melalui media cetak, penayangan di media elektronik, hingga pengunggahan media di setiap media sosial resmi yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera terkhusus di wilayah Kalimantan Timur.

Faktor pendukung strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam meraih kemenangan dalam pemilihan umum Gubernur di Kalimantan Timur tahun 2018 terletak dari citra sosial dan program kebijakan yang ditawarkan serta kehidupan pribadi kedua kandidat dalam menarik minat para pemilih untuk menjatuhkan pilihannya pada pemilukada tahun 2018, dan juga soliditas dari para tim pemenangan yang bersedia dan bersukarela memberikan dukungan seperti turun tangan untuk bekerja sama melakukan kegiatan kampanye, maupun mendukung dengan memberikan bantuan dana yang berasal dari kantong masing-masing secara sukarela tanpa terbebani.

Dalam pelaksanaannya strategi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, DPW PKS mengalami beberapa hambatan dalam memenangkan kandidatnya. Terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam Strategi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPW PKS Kalimantan Timur, mengatakan bahwa:

“kalau faktor yang menghambat strategi pelaksanaan pemilu Gubernur pada saat itu sebenarnya ada sedikit miskomunikasi di antara beberapa tim pemenangan, namun itu tentu dapat teratasi karena kita kan punya tujuan yang sama yaitu memenangkan pemilu Gubernur ini. Jadi untuk permasalahan miskomunikasi itu hanya sebentar dan cepat sekali teratasinya.”. (*Hasil wawancara, 2021*).

Ketua Bidang Humas DPW Partai Keadilan Sejahtera pun melanjutkan,

“yang menjadi faktor penghambat lainnya ya soal *black campaign*, seperti munculnya fitnah-fitnah, kalimat jelek, atau bahkan ujaran kebencian yang menyudutkan pasangan calon yang kita usung. Kemudian ada *money politic* yang sulit sekali dihindari. Tapi masalah seperti itu kan sudah biasa terjadi, dan itu hanya batu kerikil yang kecil, jadi mudah teratasi. Lebih memilih acuh dan tetap jalan saja.” (*hasil wawancara, 2021*)

Hambatan dalam strategi pelaksanaan pemilukda di Kalimantan Timur tahun 2018 ternyata merupakan permasalahan yang sudah sangat biasa untuk dihadapi dalam dunia politik, seperti perselisihan dan terjadinya miskomunikasi antar tim pemenangan, hingga konflik *black campaign* yang selalu menghantui setiap pasangan calon yang diusung. Namun, dengan munculnya segala kendala, Partai Keadilan Sejahtera terus maju dan kokoh pendirian walau diterjang berbagai macam permasalahan yang terjadi selama kampanye pada masa pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018.

Penutup

Kesimpulan

Dalam upaya pemenangan Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, PKS melakukan strategi konsolidasi tim pemenangan mulai dari tim pemenangan formal yang dibentuk secara terorganisir hingga tim pemenangan relawan dari segala tingkat dan membangun soliditas dengan berbagai pihak terutama sayap partai bersama partai koalisi pengusung dari kalangan partai nasionalis untuk bekerja dan bergerak bersama-sama dalam melakukan marketing politik. Hal ini kemudian juga diperkuat melalui optimalisasi berbagai media massa sebagai bagian dari komunikasi politik dalam mendukung kandidat yang diusungnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Faktor pendukung Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur dalam memenangkan Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 ini adalah koalisi partai pengusung pasangan calon, citra sosial dari pasangan calon, pendanaan yang sangat memadai, soliditas tim pemenangan yang sangat kompak dalam menyebarkan materi kampanye kepada masyarakat. Selain itu dukungan partai yang solid sehingga memperoleh suara mayoritas dari masyarakat pemilih. Sedangkan faktor penghambat PKS dalam meningkatkan perolehan suara antara lain terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman antar tim pemenangan, namun hal itu cepat teratasi dan tim pemenangan bisa kembali mensosialisasikan materi kampanye, hingga terjadinya black campaign yang menyudutkan pasangan calon, selain itu juga terjadi money politic yang dilakukan secara diam-diam oleh para pesaing.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Huntington, Samuel P. dan Joah Nelsons. 1997. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahardika, Timur. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Bantul: Pondok Edukasi.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika dalam Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Rosda
- Nimmo, Dan. 2009. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung. Rosda
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Soesanto, Astrid. S. 2006. Komunikasi dalam Teori dan Praktik. Bandung. Bina Cipta
Yunus, Eddy. 2016. Manajemen Strategis. Penerbit Andi. Yogyakarta

Sumber lain:

Hasil Pilkada Gubernur Kalimantan Timur periode tahun 2018-2023
<https://kaltim.kpu.go.id/hasil-pilkada/>